

PELAKSANAAN TUPOKSI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Donna Fitria dan Sujianto

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Fundamental Duty Execution And Team Function Co-ordinate The Prevention Poorness.

This research is to Know the fundamental duty execution and Team function Co-Ordinate the Prevention Poorness in Sub-Province Siakamental duty and function in Prevention of[is problem of poorness that happened in Sub-Province Siak. This Research type is use the descriptive research type. Research informan cover the Officer of exist in BAPPEDA of Sub-Province Siak in data collecting field, in this case is Team Survey from Team Co-Ordinate The Prevention Poorness (TKPK) which is spread over in all District in Sub-Province Siak and also member TKPK of[is set in Decision of Regent of Siak Number 11/HK/KPTS/2011 about Team Forming Co-Ordinate The Prevention of Poorness of Sub-Province Siak. Fundamental Duty execution and Team function Co-Ordinate the Prevention Poorness in Sub-Province Siak, have walked as according to technical guide and guide execute existing in Decision of Regent of Siak Number 11/HK/KPTS/2011 about Team Forming Co-Ordinate The Prevention of Poorness of Sub-Province Siak, where the fundamental duty have formed three working team namely: Working Team of Data and Information System [of] about impecunious society; Working Team of Partner Development; and Working Team of Society Denunciating to Prevention poorness.

Abstrak: Pelaksanaan Tupoksi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Siak. Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian meliputi Pegawai yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Siak dalam pengumpulan data lapangan, dalam hal ini adalah Tim Survey dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Siak serta anggota TKPK yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 11/HK/KPTS/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak, sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk laksana yang ada dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 11/HK/KPTS/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak, dimana tugas pokok tersebut telah membentuk tiga kelompok kerja, yakni; Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi tentang masyarakat miskin; Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: tupoksi, koordinasi, penanggulangan kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan menjadi skala utama dalam melaksanakan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat miskin selama ini hanya bersifat pelaksanaan berbagai program-program yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun hasil nyata dari program tersebut belum mampu meringankan masalah kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah.

Pemerintah pusat menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah agar membentuk Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 pasal 28 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, kemudian diteruskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adanya payung hukum tersebut, mengharuskan seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Siak berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Siak. Pemberantasan masalah kemiskinan di Kabupaten Siak, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang tertuang dalam program K2I, yakni Kemiskinan, Kebodohan

dan Infrastruktur. Program K2I yang dimaksud adalah pengentasan masalah kemiskinan, pemberantasan buta huruf atau peningkatan Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan membangun berbagai infrastruktur yang dapat mensejahterakan masyarakat di Provinsi Riau.

Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan upaya menekan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan membentuk TKPK Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 11/HK/KPTS/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak. Tugas dari Kelompok Kerja TKPK Kabupaten Siak adalah mendata jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Siak. Implementasi kebijakan pembentukan TKPK Kabupaten Siak, dikoordinator oleh BAPPEDA Kabupaten Siak, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak. Kondisi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Siak saat ini memerlukan penanganan yang serius dengan mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial, sehingga penanggulangan kemiskinan dapat diwujudkan khususnya di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Nitisemato (1984) menyebutkan, koordinasi sebagai suatu usaha kearah kelancaran kerja antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan tidak terjadi kekacauan, kesimpangsiuran, ketidaktepatan serta rangka pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya. Westra (1982) mengatakan koordniasi adalah menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan satuan-satuan pekerjaan dan orang-orang agar semua dapat berlangsung secara tertib dan seirama menuju kearah tercapainya tujuan tanpa terjadinya percekocokkan dan atau kekosongan kerja. Manullang (2006) mengungkapkan bahwa mengkoordinasikan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk meakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan peker-

jaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mecapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan *coaching* dan bila perlu memberikan teguran.

Pelaksanaan tugas menurut Dharma (1995) adalah sebagai suatu yang dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Menurut Moekijat (1995), pelaksanaan tugas adalah beberapa banyaknya pekerjaan yang dapat dicapai dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai. Hasibuan (2009) mengatakan bahwa analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Manfaat analisis pekerjaan akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia (*personel requirement*), perilaku manusia, dan alat-alat yang akan digunakan

Chamsyah (2008) mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan sumber utama munculnya masalah sosial. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh karena itu, kemiskinan pada hakikatnya adalah masalah sosial itu sendiri. Di dalam lingkaran kemiskinan tersebut terdapat berbagai masalah sosial seperti masalah fakir-miskin, anak terlantar, yatim-piatu, penyandang cacat, korban bencana alam, komunitas adat terpencil, dan lain sebagainya.

Menurut Huraerah (2003), orang miskin adalah orang yang mengalami disfungsi sosial, karena ia tidak dapat melakukan tugas-tugas pokoknya dengan baik. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya itu sangat berkaitan dengan faktor produksi. Mereka pada umumnya tidak memiliki faktor yang mencukupi, seperti tanah, modal atau keterampilan. Selain memiliki keterbatasan dalam faktor kepemilikan tadi, orang miskin juga mempunyai ciri kebudayaan kemiskinan, seperti kuatnya perasaan tidak berguna, tak berharga, tak berdaya, ketergantungan dan rendah diri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak.

METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, sedangkan analisis yang dilakukan dengan pendekatan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori-teori sebagai penemuan kualitatif. Analisis data dengan cara, kesumua data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan secara argumentasi setiap informasi dan data yang diperoleh dari responden penelitian dan responden yang dijadikan informasi kunci. Kesemua data yang diperoleh akan dipilah sesuai dengan masalah dalam penelitian ini kemudian diberi penjelasan dengan argumentasi yang sesuai dengan konsep teori dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tupoksi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 11/HK/KPTS/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak. Tugas utama dari tim ini adalah berupaya mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat miskin, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan.

Kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk menjalankan amanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 11/HK/KPTS/

2011. Keputusan yang ditetapkan perlu dilaksanakan atau diimplementasikan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Siak. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Siak tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari tim ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, menggambarkan dan menginformasikan data-data dari faktor-faktor penyumbang utama kemiskinan di Kabupaten Siak serta memberikan gambaran terhadap kebijakan dan program-program yang telah berjalan maupun pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada masa yang akan datang

Hambatan-hambatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Siak telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak, sudah barang tentu memiliki beberapa hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Untuk mengetahui beberapa hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak, akan dijabarkan dalam uraian berikut berdasarkan pengamatan atau observasi yang peneliti temukan dilapangan.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2. Keterbatasan Finansial
3. Keterbatasan Fasilitas, dan
4. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan yang belum terpadu

SIMPULAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak, sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk laksana yang ada

dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 11/HK/KPTS/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak, dimana tugas pokok tersebut telah membentuk tiga kelompok kerja, yakni Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi tentang masyarakat miskin; Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Siak, meliputi komunikasi (sosialisasi dan kampanye penanggulangan kemiskinan); penyiapan sumber daya (sumber daya manusia dan sumber dana); disposisi (komitmen dalam penanggulangan kemiskinan); dan struktur birokrasi yang membagi kewenangan-kewenangan dalam penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan seluruh SKPD dan pihak swasta di Kabupaten Siak.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

di Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Siak, terdiri dari keterbatasan sumber daya manusia dalam memantau dan memonitor pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak, fasilitas yang kurang mendukung dan manajemen yang belum terpadu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Huraerah. 2000. *Isu Kesejahteraan Sosial di Tengah Ketidakpastian Indonesia*. Bandung: CEPLAS
- Agus Dharma. 1995. *Gaya Kepemimpinan yang Efektif Bagi Para Manager*. Bandung: Sinar Baru
- M. Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moekijat. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepegawaian)*. Bandung: Mandar Maju.